

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, manfaat penelitian, kerangka berpikir penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir mengenai arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

1.1. Latar Belakang

Kota merupakan pusat berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan maupun pendidikan. Di Indonesia saat ini sekitar 59,35% penduduk tinggal di area perkotaan, diperkirakan pada tahun 2025 angka tersebut akan meningkat menjadi sebesar 67,66% dan bahkan mencapai 82% pada tahun 2045 (Roberts, Sander, & Tiwari, 2019). Kota Metro merupakan sebuah kota yang saat ini sedang berada dalam masa perkembangan yang sangat pesat baik dari segi infrastruktur maupun sosial-ekonomi. Oleh karena itu Kota Metro menjadi prioritas tujuan urbanisasi setelah Bandar Lampung. Hal tersebut dapat dilihat dari data laju pertumbuhan penduduk Kota Metro yaitu sebesar 1,56%, angka tersebut merupakan angka laju pertumbuhan penduduk terbesar kedua dari seluruh wilayah di Provinsi Lampung.

Menurut Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro tahun 2019-2021 tujuan pembangunan Kota Metro adalah “**Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif**”. Dalam hal tersebut masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan. Sehingga dapat mewujudkan integrasi dan kekuatan pembangunan melalui

partisipasi aktif masyarakat dan kerja profesional pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kota Metro juga memiliki misi, yaitu: 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata, 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan, 4) Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang *good governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Kota Metro berfokus pada pendekatan partisipatif dalam menyelenggarakan pembangunan kota. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat akan menimbulkan konsekuensi bahwa apabila tidak dilakukan peningkatan kualitas dalam pengelolaan kota maka tujuan tersebut akan sulit untuk tercapai seiring dengan permasalahan kota akan terus bertambah dan menjadi kompleks sehingga akan menyebabkan menurunnya performa kota. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan perencanaan kota menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk menjaga performa dan daya saing kota agar dapat bertahan di era revolusi industri 4.0 ini.

Era revolusi industri 4.0 adalah proses transformasi dimana secara sederhana memiliki arti yaitu perkembangan teknologi dan informasi yang terkoneksi dengan internet (*internet of things*). Hal tersebut mengakibatkan adanya disrupsi dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pola ekonomi, *social attitude*, serta kebijakan dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan kota. Dalam hal tersebut, Kota Metro sedang berada dalam semangat reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2018 Tentang penyusunan *road map* program reformasi birokrasi tahun 2018-2021. Langkah awal yang dilakukan adalah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan meluncurkan beberapa inovasi seperti sistem informasi Kota Metro yang terintegrasi, dan sistem pelayanan berbasis aplikasi atau *website* seperti Lapor Yai, E-Reputasi, SIPIKO (Sistem Informasi Perizinan dan Investasi Kota Metro), dan lain-lain. Akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik cenderung hanya berfokus terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi (TIK) untuk menyelesaikan sebuah tujuan tanpa mengambil nilai-nilai lain dari data yang masuk. Padahal data

merupakan hal yang sangat penting dalam proses perumusan perencanaan, keputusan, maupun kebijakan. Dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik pimpinan daerah juga memiliki kekuasaan relatif absolut dalam fungsi koordinasi dan pembuat kebijakan (Susanto, 2019), hal tersebut kurang sesuai apabila terus diterapkan tanpa ada peningkatan untuk mencapai tujuan pembangunan dari Kota Metro yang berdasarkan pendekatan partisipatif. Untuk meningkatkan performa dan daya saing Kota Metro pada era revolusi industri 4.0 proses implementasi pilar-pilar dari *smart city* sudah harus mulai dilaksanakan. Dari situ munculah sebuah kategorisasi kota sekaligus sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memberdayakan secara optimal teknologi terkini secara intensif yaitu *smart city* (Sukojo, Santosa, & Silas, 2019).

Smart city merupakan sebuah kota yang memiliki kemampuan memberikan respons yang cepat terhadap masukan, dan data yang berasal dari komponen kota (Susanto, 2019). Adapun peran dari konsep *smart city* yaitu untuk mengintegrasikan sistem fisik kota, dan sistem sosial, melalui bantuan teknologi seperti media *cyber* (internet). *Smart city* terdiri dari berbagai bidang yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan di perkotaan yaitu *smart people*, *smart governance*, *smart economy*, *smart environment*, dan *smart mobility*. Konsep *smart city* dianggap mampu mengatasi masalah-masalah modern perkotaan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, perekonomian, serta infrastruktur teknologi komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah dan lingkungan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk kota. Tidak hanya melahirkan sebuah kota yang modern, kota cerdas diharapkan dapat menggunakan teknologi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bagi penduduk dan pemerintah.

Smart governance direkomendasikan menjadi basis bagi keberhasilan pembangunan dimensi-dimensi *smart city* lainnya. Hal tersebut terjadi karena pemerintahan memegang peran dalam membuka jalan bagi pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya alam maupun manusia melalui pembuatan kebijakan-kebijakan dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduknya. *Smart governance* sendiri merupakan konsep tata kelola yang memanfaatkan secara

optimal peluang yang dapat diambil dari adanya teknologi dan informasi dengan menghubungkan serta mengintegrasikan lingkungan fisik, digital, publik, dan swasta untuk berinteraksi dan berkolaborasi secara aktif maupun pasif dengan masyarakat. Sehingga dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat, dan menyediakan pelayanan kapanpun dan dimanapun secara efisien, dan efektif (Guenduez, Singler, Tomczak, Schedler, & Oberli, 2018). Adapun prinsip *smart governance* mengacu pada konsep *smart city*, yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap data, informasi, wawasan terkini, serta memungkinkan penduduk untuk mendapatkan pelayanan publik dengan sangat mudah dan efisien. *Smart governance* terbukti dapat membentuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kota.

Terdapat beberapa langkah dalam upaya membangun *smart governance*, salah satunya adalah penyusunan arahan kebijakan sebagai panduan pengambilan langkah selanjutnya yaitu perumusan solusi yang disusun berdasarkan pemahaman tentang berbagai kesenjangan antara keadaan tata kelola pemerintahan Kota Metro saat ini dan keadaan yang ditargetkan yaitu *smart governance*.

1.2. Rumusan Masalah

Tujuan pembangunan tidak akan tercapai tanpa adanya sebuah ruang. Dimana sistem keruangan sebuah kota dijabarkan melalui pola dan struktur ruang untuk dapat mengakomodir kegiatan dan program-program guna mencapai tujuan pembangunan tersebut. Untuk itu pembangunan harus berjalan secara sinergis dengan tata ruang sehingga dapat mewujudkan kondisi wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Kota Metro, maka akan lebih banyak interaksi maupun aspirasi, pandangan, dan kebutuhan yang harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan proses

perencanaan pembangunan dan tata ruang yang dapat mempengaruhi kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal tersebut, Pemerintah khususnya yang bekerja dalam urusan pembangunan dan tata ruang memiliki kewajiban untuk menjamin keberhasilan tujuan pembangunan disegala bidang. Saat ini Pemerintah Kota Metro khususnya yang berada dalam urusan pembangunan dan tata ruang telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, akan tetapi pelaksanaan sistem tersebut cenderung hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga diperlukan strategi lain yang dapat membantu menjaga performa kota dan mewujudkan tujuan pembangunan dari kota.

Oleh karena itu *smart governance* menjadi sebuah konsep yang populer untuk dikembangkan dalam membantu mewujudkan tujuan pembangunan dan tata ruang melalui proses tranformasi sistem tata kelola pemerintahan dengan bantuan dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam proses pengembangan *smart governance* dibutuhkan arahan kebijakan sebagai pengambilan langkah selanjutnya yaitu perumusan solusi yang disusun berdasarkan pemahaman tentang berbagai kesenjangan antara keadaan tata kelola pemerintahan Kota Metro saat ini dan keadaan yang ditargetkan. Namun sejauh ini, Kota Metro belum memiliki penelitian yang membahas mengenai arahan kebijakan tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut, timbulah pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang?”**

1.3. Tujuan dan Sasaran

Penelitian dilakukan dengan tujuan menentukan arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang. untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka terdapat sasaran penelitian:

1. Menemukenali kebijakan dan strategi pengembangan *smart governance* di kota metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

2. Mengukur tingkat kematangan pelaksanaan *Smart governance* dalam urusan pembangunan dan tata ruang dilihat dari kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia pengelola pemerintahan sebagai pendukung.
3. Menyusun arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

1.4. Manfaat Penelitian

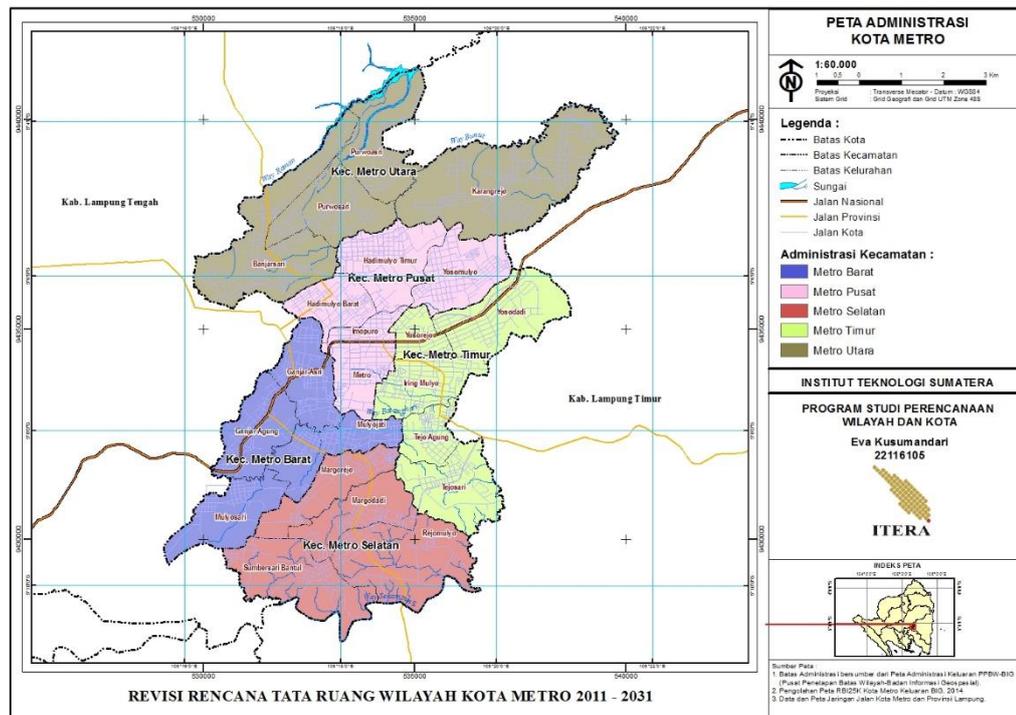
Manfaat penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah sebagai upaya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai penerapan prinsip-prinsip *smart governance* terutama dalam konteks tata kelola, dan lebih spesifik terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam urusan pembangunan dan tata ruang. Serta memberikan informasi tentang kondisi pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang.
2. Manfaat praktis bagi pemerintahan, yaitu sebagai bahan pertimbangan maupun masukan mengenai arahan atau langkah yang dapat diambil oleh Kota Metro dalam pengembangan konsep *smart governance*, terutama dalam konteks tata kelola dan hubungan pemerintah dengan masyarakat di lingkup pembangunan dan tata ruang. Selain itu dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi kota-kota lain yang mengembangkan konsep yang sama.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dijelaskan terdiri dari ruang lingkup wilayah yang berisi tentang informasi umum lokasi penelitian dan ruang lingkup materi yang berisi tentang batasan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian.

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah



Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1.1 PETA BATAS ADMINISTRASI KOTA METRO

Wilayah yang menjadi objek studi dalam penelitian ini adalah Kota Metro. Kota Metro dipilih karena berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Kota Metro merupakan sebuah kota dengan luas wilayah yang kecil dengan potensi sumber daya pertanian serta industri kreatif yang sangat besar. Hal tersebut didukung oleh riwayat rawan bencana di Kota Metro yang sangat kecil. Oleh karena itu, Kota Metro sangat berpotensi untuk menarik minat warga yang harus melakukan urbanisasi, hal tersebut telah terjadi dimana saat ini jumlah penduduk Kota Metro terus bertambah dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Untuk mempersiapkan hal tersebut, perlu dipersiapkan sebuah terobosan baru yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga Kota Metro yang berkelanjutan yaitu melalui penerapan konsep *smart governance*.

Metro merupakan satu dari dua wilayah administrasi yang berstatus kota di Provinsi Lampung. Secara geografis, Kota Metro terletak pada 105,170-105,190 bujur timur dan 5,60-5,80 lintang selatan, dan berjarak kurang lebih 45 kilometer

dari Ibukota Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung. Adapun batasan wilayah administratif Kota Metro:

Utara : Punggur dan Pekalongan

Timur : Pekalongan dan Batanghari

Selatan: Metro Kibang

Barat : Trimurjo

1.5.2. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial merupakan suatu batasan dalam penelitian. Ruang lingkup substansial bertujuan untuk membatasi materi yang akan dibahas pada analisis penelitian. Ruang lingkup substansial pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pembangunan dan Tata Ruang

Pembangunan adalah perubahan yang mengarah pada kondisi lebih baik dan dilakukan dengan perencanaan, serta diikuti dengan aspek lain yaitu implementasi, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan. Sedangkan tata ruang merupakan perwujudan dari pola dan struktur ruang sebagai wadah kegiatan yang dihasilkan dari pembangunan.

Pemerintah khususnya yang bekerja dalam urusan pembangunan dan tata ruang memiliki kewajiban untuk menjamin keberhasilan pembangunan disegala bidang. Sebuah pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup setiap lapisan masyarakat. *Smart governance* menjadi sebuah konsep yang populer untuk dikembangkan dalam membantu mewujudkan tujuan pembangunan dan tata ruang melalui proses transformasi sistem tata kelola pemerintahan dengan bantuan dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Sehingga pembangunan dapat berjalan sinergis dengan tata ruang dan dapat mewujudkan kondisi wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Batasan substansial terakait dengan urusan pembangunan dan tata ruang berpengaruh terhadap pemilihan instansi yang menjadi narasumber dalam penelitian.

2. *Government – citizen (G-C)* dalam konsep *Smart Governance*

Smart governance dapat menjadi sebuah katalis untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan dengan budaya dan praktik *citizen-centered policy* yaitu setiap kebijakan diambil dengan cara aktif berkomunikasi dan mengakomodasi pendapat/masukan dari masyarakat, berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat yang inovatif dan kreatif, serta dapat membangun birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. hal tersebut dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan masyarakat merasa ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang.

Penelitian ini akan fokus membahas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan *smart governance*, termasuk kebijakan strategi yang dimiliki oleh Kota Metro, ruang-ruang partisipasi dan pelayanan digital yang telah dikembangkan oleh Kota Metro, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kota Metro dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan *smart governance*. Batasan substansial terkait dengan hubungan pemerintah dengan masyarakat berpengaruh terhadap pemilihan variabel yang akan dibahas dalam analisis. Adapun variabel yang digunakan untuk analisis dan pembahasan pada penelitian ini adalah kebijakan dan strategi, pendanaan, layanan publik, ketersediaan infrastruktur pendukung, literasi digital, serta kapasitas pelayanan pemerintah.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam Urusan Pembangunan dan Tata ruang. Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang menyerupai penelitian ini. Namun terdapat perbedaan dalam proses penyelesaian, maupun tujuan penelitian yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

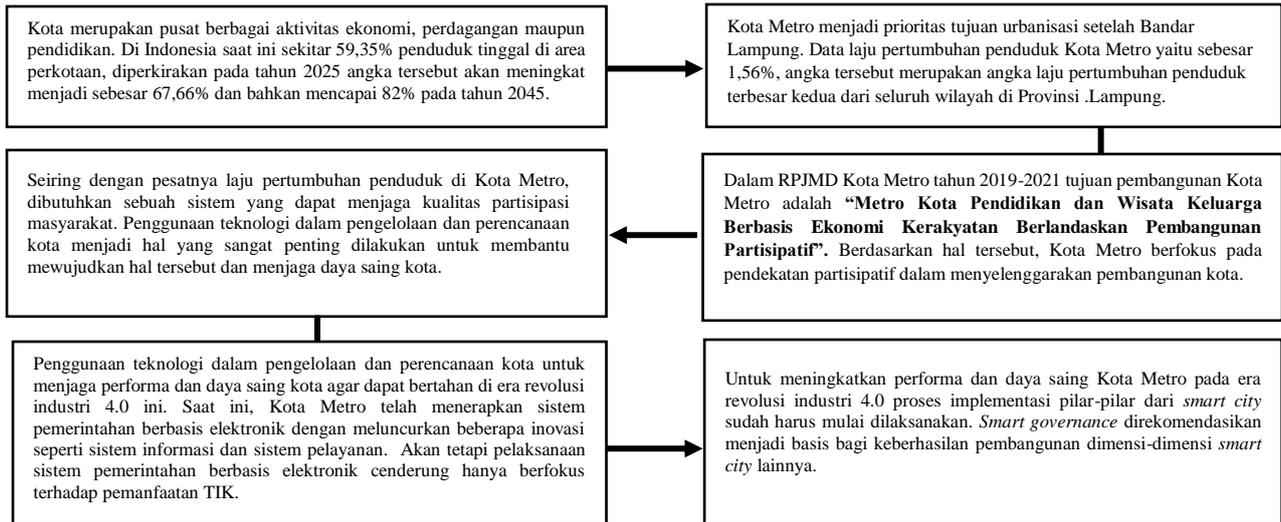
TABEL I.1 KEASLIAN PENELITIAN

No.	Penulis	Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Muhammad Akmal Juniawan, Puspa Sandhyaduhita, Betty Purwandari, Satrio Baskoro Yudhoatmojo, Made Ayu Aristyana Dewi	2017	<i>Smart Government Assessment Using Scottish Smart City Maturity Model: A Case Study of Depok City</i>	<i>Scottish Smart City Maturity Model</i> , Skala Likert, Analisis Konten	Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kematangan <i>smart governance</i> di Kota Depok melalui variabel strategi, data, teknologi, tata kelola dan model pelayanan, serta keterikatan <i>stakeholder</i> . Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa saat ini Kota Depok berada pada level tingkat kematangan penerapan konsep <i>smart governance ad-hoc</i> .	Perbedaan penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan metode penelitian.
2.	Hendra Sandhi Firmanyah, Suhono H. Supangkat, Arry A. Arman, Ryan Adhitya	2017	<i>Searching Smart City in Indonesia Through Maturity Model Analysis (Case Study in 10 Cities)</i>	Garuda smart City Model, Skoring, Analisis Gap	Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kematangan <i>smart city</i> di 10 Kota yang terdiri dari lima kota besar, tiga kota menengah, dan dua kota kecil. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata penerapan <i>smart city</i> di kota-kota yang dipilih ada di level tingkat kematangan <i>scattered</i> dengan implementasi penggunaan TIK untuk kegiatan sehari-hari, namun masih terdapat kekurangan antara lain dukungan sumber daya manusia dan pemerintah.	Perbedaan penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian, lokasi penelitian, penggunaan metode tingkat kematangan, dan metode analisis penelitian.
3.	Chandra Eko Wahyudi Utomo, Mochamad Hariadi	2016	Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dibutuhkan bagi penerapan konsep <i>smart city</i> akan berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Adapun tantangan yang biasanya dihadapi oleh kota yang sedang berusaha mewujudkan <i>smart city</i> yaitu ketersediaan data dan informasi, keamanan dan privasi, investasi yang sangat besar, infrastruktur IT, adaptasi sosial dan pengembangan aplikasi.	Perbedaan penelitian terdapat pada metode analisis yang digunakan, dan juga fokus penelitian

No.	Penulis	Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
4.	Tim Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Unoversitas Gajah Mada	2016	Roadmap Kota Yogyakarta Menuju <i>Smart City</i>	Analisis Deskriptif, Analisis Deret Waktu (<i>time series</i>)	Penelitian ini mengukur pelaksanaan <i>smart city</i> di Kota Yogyakarta dengan membandingkan skor melalui parameter <i>Boyd Cohen Smart City Wheel</i> dengan kota lain di dunia yaitu Toroto, Ahmedabad, dan Shanghai. Hasilnya adalah Yogyakarta unggul terhadap Kota Ahmedabad dari sisi <i>Smart People</i> , unggul terhadap Kota Shanghai dan Ahmedabad dari sisi <i>Smart Environment</i> , bersaing tipis dengan Ahmedabad pada <i>Smart Living</i> dan dimensi lainnya masih tertinggal dari Toronto, Ahmedabad dan Shanghai. Adapun hal yang perlu dijadikan perhatian adalah <i>branding smart city</i> , <i>penyelarasan kebijakan dan strategi yogyakarta smart city</i> , <i>penataan unsur yogyakarta smart city</i> ,serta pembangunan dan pengembangan yogyakarta <i>smart city</i> .	Perbedaan dapat dilihat dari metode analisis, lokasi penelitian, dan tujuan penelitian yaitu <i>roadmap</i> merupakan pedoman yang lebih rinci jika dibandingkan dengan arahan kebijakan.

Sumber: Peneliti, 2020

1.7. Kerangka Berpikir



LATAR BELAKANG

Dalam proses tata kelola pemerintahan menuju *smart governance* dibutuhkan arahan kebijakan sebagai pengambilan langkah selanjutnya yaitu perumusan solusi yang disusun berdasarkan pemahaman tentang berbagai kesenjangan antara keadaan tata kelola pemerintahan Kota Metro saat ini dan keadaan yang ditargetkan. Namun sejauh ini, belum disusun arahan kebijakan tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut, timbulah pertanyaan penelitian yaitu “**Bagaimana arahan kebijakan pengembangan smart governance di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang?**”

RUMUSAN MASALAH

Tujuan penelitian adalah menentukan arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

TUJUAN PENELITIAN

Menemukenali kebijakan dan strategi menuju *smart governance* di kota metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

SASARAN

- Visi dan Strategi
- Pendanaan

VARIABEL

Analisis Deskriptif

ANALISIS

Menemukan kebijakan dan strategi tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan menuju *Smart Governance* di organisasi perangkat daerah berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang Kota Metro

Mengukur tingkat kematangan pelaksanaan *Smart Governance* dalam urusan pembangunan dan tata ruang dilihat dari kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia pengelola pemerintahan sebagai pendukung.

- Pelayanan publik
- Ketersediaan infrastruktur pendukung
- Iliterasi digital

Analisis Skoring

Tingkat kesiapan pelaksanaan *Smart Governance* dilihat dari infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai pendukung.

Menyusun arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

- Kapasitas pelayanan

Analisis Deskriptif

Arahan kebijakan pengembangan *Smart Governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

OUTPUT PENELITIAN

1.8. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dilakukan terdiri dari metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan dijelaskan sesuai dengan masing-masing sasaran penelitian.

1.8.1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif dengan metode pendekatan campuran (*mixed methods*). John W. Creswell dalam bukunya berjudul *Research Design Third Edition* (Creswell, 2018) menjelaskan pendekatan campuran sebagai berikut:

“Mixed methods research is an approach to inquiry involving collecting both quantitative and qualitative data, integrating the two forms of data, and using distinct designs that may involve philosophical assumptions and theoretical frameworks. The core assumption of this form of inquiry is that the integration of qualitative and quantitative data yields additional insight beyond the information provided by either the quantitative or qualitative data alone.”

Dalam penelitian ini metode pendekatan campuran digunakan untuk menyelesaikan sasaran dengan teknik analisis yang berbeda sehingga memiliki hasil yang komperhensif dan integratif agar mampu memberikan pemahaman yang lebih baik dalam menyusun arahan kebijakan pengembangan *smart governance* dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

1.8.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Adapun data yang dikumpulkan adalah kebutuhan dari sasaran penelitian yang akan dianalisis.

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui survei langsung kepada narasumber untuk memperoleh data sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada organisasi perangkat daerah dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

Data primer didapatkan melalui teknik pengumpulan data wawancara (*interview*), yang dilakukan melalui pendekatan *purposive sampling*. *Purposive sampling* termasuk dalam teknik *non-probability* yang tidak membutuhkan penentuan jumlah narasumber. Metode pengumpulan data *purposive sampling* dilakukan dengan menentukan narasumber berdasarkan kriteria atau kualifikasi tertentu sehingga dapat memberikan informasi mendalam terkait dengan penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dalam rangka menyelesaikan sasaran kedua yaitu tingkat kematangan pelaksanaan *smart governance* dalam urusan pembangunan dan tata ruang dilihat dari kesiapan pelayanan publik, infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia pengelola pemerintahan sebagai pendukung. Berikut adalah kriteria informan yang ditetapkan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini:

TABEL I.2 KRITERIA INFORMAN PENGAMBILAN DATA PRIMER

No.	Kriteria Informan
1.	Merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan lebih (Kepala dinas/kepala bidang, tenaga ahli/teknisi) mengenai sistem tata kelola dalam masing-masing organisasi perangkat daerah berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang di Kota Metro.
2.	Dianjurkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan dasar terhadap <i>Smart City</i> .

Sumber: Peneliti, 2020

selain itu, pengambilan data primer dilakukan sesuai dengan ruang lingkup substansial penelitian yaitu di organisasi perangkat daerah yang termasuk dalam urusan pembangunan dan tata ruang. Adapun lokasi pengambilan dan narasumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

TABEL I.3 LOKASI DAN NARASUMBER PENGAMBILAN DATA

No.	Instansi	Lokasi	Justifikasi Pemilihan Instansi	Jabatan Narasumber
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro	Jl. Tulang Bawang No.10 A, Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro.	Diskominfo merupakan instansi yang berperan sebagai fasilitator (<i>enabler</i>) pelaksanaan <i>Smart City</i> .	Kepala Seksi Aplikasi Informatika

No.	Instansi	Lokasi	Justifikasi Pemilihan Instansi	Jabatan Narasumber
2.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro	Jl. AH Nasution No.5, Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro.	BAPPEDA memiliki fungsi terkait perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terkait pembangunan daerah skala kota.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang
				Kepala Sub-bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
				Kepala Sub-bidang Infrastruktur
				Kepala Sub-bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro	Jalan ZA Pagar Alam No. 09, Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro merupakan organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam perumusan kebijakan, pembinaan dan bimbingan, serta perizinan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang sebagai pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur Kota Metro sesuai dengan perkembangan kota.	Kepala Bidang Cipta Karya
				Kepala Sub-bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	Jl. AH Nasution No.42, Yosorejo, Kec. Metro Tim., Kota Metro.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro memiliki peran sebagai penyelenggara penyediaan rumah umum dan komersil, serta operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.	Kepala Sub-bagian Perencanaan dan Keuangan
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro	Jl. Tongkol No.40, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro.	DLH memiliki fungsi terkait perizinan dan penyelesaian pengaduan di bidang lingkungan hidup.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
				Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

No.	Instansi	Lokasi	Justifikasi Pemilihan Instansi	Jabatan Narasumber
6.	ATR/BPN	Jl. AH Nasution, Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro.	ATR/BPN memiliki fungsi terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Kepala Sub-Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan
7.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jl. A.H. Nasution No. 05, Kota Metro, Provinsi Lampung.	BPPRD merupakan OPD yang memiliki fungsi sebagai pelaksana, dan pengawas sistem perpajakan di Kota Metro.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Tenaga Ahli Bidang Penetapan dan Penagihan (Operator Smart Gov. BPPRD)
8.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro	Jl. Kyai Haji Arsyad No. 1, Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro memiliki tugas yang salah satunya terkait dengan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan layanan

Sumber: Peneliti, 2020

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendapatkan data sasaran pertama yaitu terkait kebijakan dan strategi pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang, dan sasaran ketiga yaitu penyusunan arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi literatur melalui buku, penelitian terdahulu, jurnal, artikel melalui media masa seperti internet, dan data sekunder lainnya yang bersumber dari pengumpulan dokumen/arsip/data dari institusi yang terkait.

1.8.3. Metode Analisis Data

Tahap metode analisis data dilakukan untuk menjawab tiap sasaran dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode analisis data yang digunakan untuk

penelitian ini adalah analisis deskriptif, dan analisis skoring. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing metode analisis berdasarkan sasaran.

Sasaran 1: Menemukenali kebijakan dan strategi pengembangan *smart governance* di kota metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

Sasaran pertama penelitian akan dicapai menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang dilakukan melalui deskripsi atau penggambaran terhadap objek yang berkaitan dengan penelitian. Analisis deskriptif akan berfokus pada penjelasan mengenai kondisi sebenarnya saat penelitian dilaksanakan.

Pada sasaran ini, metode analisis deskriptif digunakan dengan cara meninjau data sekunder yang berasal dari dokumen resmi daerah Kota Metro terkait kebijakan dan strategi yang mendukung pelaksanaan *smart governance* dalam urusan pembangunan dan tata ruang di Kota Metro, serta mendeskripsikan kondisi pelayanan publik, infrastruktur penunjang, dan literasi digital dari hasil wawancara kepada narasumber yang telah dipilih berdasarkan kriteria di masing-masing instansi terpilih. Analisis deskriptif dipilih karena dirasa mampu untuk memberikan penjelasan terkait data yang diperoleh untuk menjawab sasaran.

Sasaran 2: Mengukur tingkat kematangan pelaksanaan *smart governance* dalam urusan pembangunan dan tata ruang dilihat dari kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia pengelola pemerintahan sebagai pendukung.

Metode analisis yang digunakan dalam sasaran ini adalah analisis skoring pada tiga variabel yaitu layanan publik, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan literasi digital pada organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang. Metode analisis skoring dilakukan untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kematangan menuju *smart governance*. Berikut adalah penjelasan kriteria dan skor yang diberikan pada masing-masing indikator sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

a. Variabel Layanan Publik

Variabel pelayanan publik dibutuhkan untuk mewujudkan penyediaan sarana prasarana, dan pelayanan administrasi terkait perizinan, serta hubungan organisasi perangkat daerah dengan masyarakat yang inovatif dan mudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

TABEL I.4 VARIABEL LAYANAN PUBLIK

Variabel Terpilih	Indikator	Kriteria	Skor
Layanan publik	Adanya relasi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai upaya membuka jalan bagi partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan atau tata ruang.	Tidak terdapat partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan publik	0
		Terdapat partisipasi masyarakat yang dilakukan secara konvensional namun belum memiliki dampak terhadap perencanaan	1
		Terdapat partisipasi masyarakat melalui media konvensional dan dampaknya terlihat bagi perencanaan pembangunan tata ruang	2
		Terdapat media <i>online</i> bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang	3
		Media <i>online</i> bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan tata ruang dikelola dengan baik dan digunakan rutin sehingga memiliki dampak terhadap hasil perencanaan dan pembangunan	4
		Media <i>online</i> partisipasi masyarakat mudah diakses seluruh masyarakat dan mampu menciptakan perbaikan yang berkelanjutan dalam membangun daya saing kota	5
		Organisasi perangkat daerah berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang yang menyediakan akses publik bagi data dan informasi.	Tidak terdapat akses publik bagi penyediaan data dan informasi
	Terdapat rencana pengembangan akses publik bagi data dan informasi pada masing-masing organisasi perangkat daerah		1
	Terdapat akses publik bagi data dan informasi yang dibagikan melalui <i>platform data digital</i> seperti sosial media, <i>website</i> , atau aplikasi		2
	Akses publik melalui <i>platform digital</i> bagi data dan informasi beroperasi secara rutin dan <i>update</i>		3
	Adanya akses publik bagi data dan informasi melalui <i>platform digital</i> yang sudah terintegrasi memberikan dampak baik terhadap tata kelola perangkat daerah		4

Variabel Terpilih	Indikator	Kriteria	Skor
		<i>Platform digital</i> data dan informasi rutin diperbaharui, lengkap, terintegrasi, mudah diakses seluruh masyarakat, dan informatif	5
	Lembaga pemerintah di bidang pembangunan dan tata ruang yang memiliki inovasi dalam sistem penyampaian pelayanan dan pengambilan keputusan melalui media sosial, <i>website</i> atau aplikasi.	Lembaga tidak memiliki inovasi <i>platform digital</i> dalam bentuk sosial media/ <i>website</i> /aplikasi bagi sistem pelayanan dan pengambilan keputusan	0
		Terdapat rencana pengembangan pelayanan dan pengambilan keputusan melalui <i>platform digital</i> dalam bentuk sosial media/ <i>website</i> /aplikasi pada masing-masing organisasi perangkat daerah	1
		Terdapat <i>platform digital</i> pelayanan dan pengambilan keputusan namun belum digunakan secara optimal	2
		<i>platform digital</i> pelayanan dan pengambilan keputusan digunakan secara rutin oleh masyarakat	3
		<i>platform digital</i> pelayanan dan pengambilan keputusan menjadi inovasi unggul yang berdampak baik terhadap efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan organisasi perangkat daerah	4
		<i>platform digital</i> pelayanan dan pengambilan keputusan dikelola dengan baik dan mampu beradaptasi pada perubahan, serta mudah diakses oleh masyarakat	5
		Penyampaian informasi geospasial	Tidak terdapat media sistem informasi geospasial
	Terdapat rencana pengembangan sistem informasi geospasial melalui <i>webgis</i>		1
	<i>Webgis</i> berorientasi pada <i>one map policy</i>		2
	<i>Webgis</i> yang berorientasi pada <i>one map policy</i> rutin diperbaharui sehingga informasi yang ada didalamnya merupakan informasi terbaru dan valid		3
	<i>One map policy</i> berhasil memberikan dampak untuk mengantisipasi adanya permasalahan mengenai pembangunan dan tata ruang		4
	Penyampaian informasi geospasial melalui <i>one map policy</i> dikelola secara berkelanjutan		5
	Aplikasi/ <i>website</i> /media sosial bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait	Tidak ada <i>platform digital</i> bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan	0
		Terdapat rencana pengembangan <i>platform digital</i> bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan	1

Variabel Terpilih	Indikator	Kriteria	Skor
	kondisi/permasalahan pembangunan dan tata ruang Kota Metro.	Tersedia <i>platform digital</i> bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan namun belum digunakan secara optimal	2
		<i>Platform digital</i> bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dikelola dengan baik sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan	3
		<i>Platform digital</i> bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan menjadi salah satu sumber data untuk merumuskan rencana pembangunan dan tata ruang	4
		<i>Platform digital</i> bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan cepat tanggap dan mudah diakses oleh masyarakat	5
	Rentang waktu penyelesaian pengaduan/pelayanan publik/ perizinan melalui <i>platform digital</i>	Tidak ada <i>platform</i> pengaduan/pelayanan publik/perizinan <i>online</i>	0
		Tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian pengaduan/pelayanan publik/perizinan	1
		9-10 hari dari waktu penyampaian pengaduan/pelayanan publik/ perizinan	2
		6-8 hari dari waktu penyampaian pengaduan/pelayanan publik/ perizinan	3
		3-5 hari dari waktu penyampaian pengaduan/pelayanan publik/ perizinan	4
		1-2 hari dari waktu penyampaian pengaduan/pelayanan publik/ perizinan	5

Sumber: *Kominfo dalam* (Sukojo, Santosa, & Silas, 2019), (Cohen, 2012), (PPN/Bappenas, 2015), (Giffinger, 2007), (Scholl & Scholl, 2014), *dengan modifikasi peneliti, 2020*

Seperti yang dapat dilihat dari tabel diatas, masing-masing indikator memiliki kriteria dengan variasi bobot pada beberapa variabel. Nilai maksimal yang dapat diperoleh pada variabel ini adalah 30 dan nilai minimumnya adalah 0.

b. Variabel Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur dibutuhkan sebagai pembangkit optimalisasi pelayanan publik sesuai dengan prinsip *smart governance*. Berikut adalah penjelasan kriteria dan skornya bagi masing-masing indikator penelitian.

TABEL I.5 VARIABEL KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

Variabel Terpilih	Indikator	Kriteria	Skor
Ketersediaan infrastruktur	Ketersediaan jaringan internet dalam organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan	Organisasi perangkat daerah tidak memiliki jaringan internet	0
		Terdapat jaringan internet namun konektivitasnya belum memadai	1

Variabel Terpilih	Indikator	Kriteria	Skor
	pembangunan dan tata ruang di Kota Metro	Jaringan Internet pada masing-masing organiasi perangkat daerah dapat digunakan dengan baik	2
		Jaringan internet memiliki akses terintegrasi	3
		Jaringan internet bersifat operasional untuk mewujudkan sistem terintegrasi	4
		Sistem informasi yang terintegrasi dan tersambung dengan teknologi <i>internet of things</i>	5
	Penyediaan akses internet publik	Tidak ada akses internet publik	0
		Terdapat rencana penyediaan akses internet bagi publik	1
		Terdapat titik-titik fasilitas penyediaan akses internet bagi publik namun belum berjalan dengan optimal	2
		Fasilitas akses internet bagi publik dapat diakses dengan mudah dengan konektivitas yang memadai	3
		Fasilitas akses internet bagi publik memberikan dampak sosial bagi masyarakat terhadap penggunaan teknologi	4
		Fasilitas akses internet bagi publik mudah diakses, terdapat di banyak titik dengan konektivitas memadai, dan berkelanjutan	5

Sumber: (Djunaedi, et al., 2018) dan (Scholl & Scholl, 2014) dengan modifikasi peneliti, 2020

Variabel Perbaikan infrastruktur terdiri dari dua indikator yaitu ketersediaan jaringan internet dan adanya fasilitas akses publik bagi jaringan internet. Pada variabel ini, nilai maksimal yang dapat diperoleh dari masing-masing indikator adalah 10, sedangkan nilai minimum yang dimiliki adalah 0.

c. Literasi Digital

Literasi digital dibutuhkan untuk mengukur kesiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip *smart governance*.

TABEL I.6 VARIABEL LITERASI DIGITAL

Variabel Terpilih	Indikator	Kriteria	Skor
Literasi digital	Jumlah sumber daya yang memiliki pengetahuan dasar dalam menggunakan teknologi digital di lembaga pemerintah Kota Metro yang berkaitan	Tidak ada SDM perangkat daerah yang memiliki pengetahuan dasar dalam menggunakan teknologi digital	0
		Terdapat SDM yang memiliki pengetahuan dasar dalam	1

Variabel Terpilih	Indikator	Kriteria	Skor	
	dengan pembangunan dan tata ruang.	menggunakan teknologi, namun jumlahnya tidak memadai		
		Ketersediaan dan kompetensi SDM cukup memadai	2	
		Terdapat SDM memadai yang memiliki pengetahuan dasar dalam penggunaan teknologi digital dan mulai diarahkan kedalam sektor TIK	3	
		Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dasar dalam bidang teknologi digital dikelola secara terkoordinasi dan efisien dengan kompetensi yang dapat mengikuti kebutuhan pengembangan kota cerdas	4	
		Ketersediaan SDM mampu memunculkan peluang-peluang baru yang kreatif dan inovatif	5	
	Jumlah pelatihan tentang analisis dan ilmu tentang data digital.	Tidak ada pelatihan		0
		Tersedia pelatihan tentang analisis dan ilmu tentang data digital dalam kurun waktu dua tahun terakhir		1
		Tersedia pelatihan rutin yang diberikan bagi pegawai pelayanan publik		2
		Pelatihan berhasil menambah pengetahuan perangkat daerah dan dapat diterapkan langsung dalam operasional tata kelola pemerintahan		3
		Pelatihan yang dilakukan merupakan pelatihan khusus yang diarahkan bagi pengembangan <i>Smart Governance</i>		4
		Pelatihan mampu menambah kapasitas sumberdaya perangkat daerah dalam menjalankan prinsip <i>Smart Governance</i>		5

Sumber: *Smart nation Singapore: (The Way Forward 2018)* dengan modifikasi peneliti, 2020

Dari tabel diatas, diketahui bahwa masing-masing indikator memiliki rentang skor bervariasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dari indikator tersebut maka didapatkan nilai maksimal yang dapat diperoleh pada variabel literasi digital adalah 10, sedangkan nilai minimumnya adalah 0.

Hasil dari kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia sebagai pengelola pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan *smart governance* diukur dari tingkat kesiapan melalui penjumlahan skor dari masing-masing kriteria yang diperoleh indikator.

Proses selanjutnya adalah tahap penentuan panjang interval kelas menggunakan Aturan Strugess yaitu dengan cara membagi batas cakupan data dengan jumlah kelas yang dibutuhkan (Riyadi, 1996). Jumlah kelas akan ditentukan dengan mengadopsi pengklasifikasian tahap kesiapan *smart city* yang terdiri dari enam kelas yaitu konvensional (*outsider*), *Ad-hoc*, intensional, bertujuan dan berulang, dikelola baik, dan optimal. Berikut adalah persamaan yang digunakan untuk mendapatkan panjang interval kelas:

$$I = \frac{a-b}{N}$$

dengan keterangan:

I = Panjang Interval

a = Jumlah nilai total skor tertinggi

b = Jumlah nilai total skor terendah

N = Jumlah kelas yang dipilih

berikut adalah hasil perhitungan penentuan klasifikasi yang akan digunakan pada penelitian

$$a = 30+10+10 = 50$$

$$b = 0+0+0 = 0$$

$$N = 6$$

jadi interval penentuan klasifikasi adalah

$$I = \frac{50-0}{6} \\ = 8,3$$

Interval kelas kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia sebagai pengelola pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan *smart governance* pada organisasi perangkat daerah berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang adalah sebagai berikut:

TABEL I.7 KLASIFIKASI KEMATANGAN TATA KELOLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG MENUJU *SMART GOVERNANCE*

SKOR	Tingkat kematangan	Keterangan
0-8	<i>Outsider</i>	Tata kelola pada organisasi perangkat daerah berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang belum mengarah pada pemanfaatan TIK dalam melaksanakan pelayanan.
8.1-16.4	<i>Ad-Hoc</i>	Beberapa proyek Ad-Hoc tentang implementasi TIK, dan masih bersifat sektoral (terbatas dalam sebuah OPD).
16.5-24.8	Intensional	Penggunaan TIK dalam sistem kolaborasi, serta penyelarasan antar unit pelaku. Mulai tersedia layanan publik berbasis TIK.
24.9-33.2	Bertujuan dan Berulang	Penggunaan TIK telah memiliki hasil dengan layanan publik berbasis TIK yang beroperasi secara rutin.
33.3-41.6	Dikelola Baik	Teknologi dan data, memunculkan dampak yang membawa pengaruh terhadap struktur tata kelola pada keseluruhan ekosistem kota.
41.7-50	Optimal	Memiliki <i>platform</i> pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat dan berkelanjutan.

Sumber: (The Scottish Government, 2014), dengan modifikasi peneliti, 2020

Hasil dari analisis skoring adalah tingkat kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia sebagai pengelola pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan *smart governance* pada organisasi perangkat daerah berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang di Kota Metro. Hasil tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan arahan kebijakan yang akan dijelaskan pada sasaran selanjutnya.

Sasaran 3: Menyusun arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang

Hasil sasaran ketiga sekaligus tujuan penelitian memiliki hubungan dengan hasil dari kedua sasaran sebelumnya. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan sasaran ini adalah metode analisis deskriptif. Penggunaan analisis deskriptif dipilih karena dapat menjelaskan dan menyimpulkan garis besar dari hasil kedua sasaran sebelumnya secara objektif sehingga dapat menghasilkan sebuah arahan kebijakan yang komperhensif dan dapat diimplementasikan. Pendekatan analisis deskriptif dilakukan dengan cara elaborasi hasil dari kedua analisis, kemudian merumuskan arahan arahan kebijakan untuk menuju *smart governance* di Kota Metro.

1.9. Sistematika Penulisan

Berikut adalah struktur dan isi dari setiap bab pada penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, manfaat penelitian, kerangka berpikir penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian mengenai arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjelasan umum mengenai teori yang didapatkan dari berbagai sumber literatur yaitu teori mengenai manajemen perkotaan, manajemen strategis sektor publik, tata kelola pemerintahan kota, *smart city*, *smart governance* untuk menemukan variabel penelitian yang disusun dalam sintesa variabel.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum dari wilayah penelitian yaitu Kota Metro meliputi gambaran umum geografis, gambaran umum demografi, serta gambaran umum pemerintahan Kota Metro.

BAB IV ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN *SMART GOVERNANCE* DI KOTA METRO DALAM URUSAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG

Bagian ini akan menjelaskan analisis penelitian untuk merumuskan arahan kebijakan pengembangan *smart governance* di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang. Analisis akan dimulai dari identifikasi terkait kebijakan dan strategi pengembangan *smart governance* di kota metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang, kemudian dilanjutkan dengan mengukur tingkat kematangan pelaksanaan *smart governance* dalam urusan pembangunan dan tata ruang dilihat dari kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia sebagai pengelola pemerintahan sebagai pendukung.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini akan menjelaskan temuan studi yang akan menjadi pengantar bagi kesimpulan dalam studi ini. Selain itu, akan dibahas pula rekomendasi dan kelemahan studi yang nantinya akan dilengkapi melalui saran untuk studi lanjutan.